

**PEMBAJAKAN HADIS NABI:
PEMIKIRIAN POLITIK KELOMPOK EKSTRIMIS INDONESIA
ERA POLITIK MILENIAL**

¹Abdul Matin bin Salman
abdulmatin693@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan munculnya primordialisme ekstrim di ruang publik untuk kepentingan politik. Fenomena ini lazim terjadi sejak masa Islam zaman sahabat hingga saat ini. Penggunaan agama sebagai legitimator kekuasaan atau sebaliknya, merupakan hal yang lazim terjadi dalam agama dan kekuasaan manapun. Tidak heran, penggunaan simbol-simbol agama dalam konteks politik semakin ke sini semakin canggih secanggih media yang melahirkannya. Alih-alih dapat dideskripsikan, manuver politik melalui media era millennial bahkan tak dapat dikendalikan oleh siapapun. Konten politik dan agama tak kalah seru memenuhi hampir setiap media dan aplikasi yang tersajikan dengan cepat dan mudah. Tak peduli seberapa kuat akurasi data yang disajikan, yang terpenting adalah semangat menemukan manuver baru dalam rangka mengalahkan yang lain dan menjadi paling eksis. Kelompok politik ekstrimis-religius memasang dan mengunduh sumber-sumber keagamaan dan menyajikannya dalam konteks kepentingan politik tertentu. Materi-materi yang diunduh dan dipasang biasanya berkaitan erat dengan tafsir al-Qur'an dan hadis nabi. Lebih dari 60% argumen politik yang dibangun biasanya didasarkan pada sumber tidak valid atau setidaknya hasil pemahaman kurang akurat atas hadis nabi dan peristiwa-peristiwa kenabian. Simbol-simbol kenabian atau yang mengidentikkan seseorang atau kelompok kepada yang paling mirip dengan nabi pun dilakukan, meski tidak lazim dan masih semu bagi pemahaman awam. Menempatkan simbol-simbol agama dalam spanduk politik, dan menggunakan instrument ulama yang paling sunnah sebagai instrument untuk meningkatkan elektabilitas politik. Telah terjadi pergeseran fungsi agama dari posisinya sebagai pembimbing menjadi hanya instrumen untuk mendapatkan kepentingan kekuasaan politik semata.

¹ Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Kata Kunci: Pembajakan Hadis, Radikalisme, Politik Millennial

ABSTRACT

This paper describes the emergence of extreme primordialism in the public sphere for political purposes. This phenomenon of primordialism has been prevalent since the days of Islam in the early era. The use of religion as a legitimator of power or vice versa, is common in any religion and governor. Unsurprisingly, the use of religious symbols in a political context is getting more sophisticated as under media controlled, as a result, political maneuver through millennial media cannot even be controlled by anyone. Political and religious content meet almost every media which are presented quickly and easily. No matter how strong the accuracy of the data presented, the most important thing is the spirit of finding new strategies to defeat the others and become the most existing. Extremist-religious political groups install and download religious sources and present them in the context of certain political interests. The material downloaded and posted is usually closely related to the interpretation of the Qur'an and the hadith of the Prophet. More than 60% of the political arguments usually built based on invalid sources or at least the results of inaccurate understanding of prophetic traditions and events. Prophetic symbols or those that identify a person or group to the one most similar to the prophet are carried out, although it is unusual and still apparent for ordinary understanding. Placing religious symbols in political banners, and using the most sunnah ulama as instruments to increase political electability. There has been a shift in the function of religion, from its position as a guide to just an instrument to obtain the interests of political power alone.

Keywords: Hadith Piracy, Radicalism, Millennial Politics

A. PENDAHULUAN

Indonesia pasca era reformasi tahun 1997-1998 mengalami fase euforia di segala bidang, terutama bidang politik, sosial dan agama. Euforia bidang politik ditandai dengan lahirnya 141 partai politik (yang terdaftar di Departemen Kehakiman). Tercatat pada pemilihan umum tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Sedangkan euforia bidang sosial ditandai dengan tuntutan kemerdekaan beberapa provinsi seperti Timor Timur, Papua Barat dan Aceh.

Selain itu, tuntutan kesetaraan hak dan keadilan juga disuarakan oleh kelompok-kelompok aktivis yang sebelumnya telah dibungkam suaranya oleh penguasa. Sementara itu, euforia di bidang agama telah melahirkan berbagai macam aliran keagamaan –terutama Islam- yang hampir-hampir tak terkendali. Hasil identifikasi bahwa, setiap aliran mewakili suara kelompok tertentu dan beberapanya bahkan, berafiliasi pada kelompok-kelompok keagamaan di luar Indonesia. Secara tegas dapat diklasifikasi pada tiga tipologi aliran, yaitu ekstrimis kanan, aliran moderat dan ekstimis kiri. Coraknya pun sangat beragam, mulai dari Kejawen hingga Puritan. Misalnya, Al-Nadzir, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Qur'an Suci, Satrio Peningit, Paruru, Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), Penganut Al-Quran Sejati, Wahdah Islamiyah (WI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga ekstrimis-ekstrimis benuansa Salafi-Wahabi.

Bergulirnya transisi demokrasi telah memberikan berbagai perubahan fundamental dalam kebijakan politik nasional. Perubahan ini telah membuka jalan bagi berbagai macam kelompok atau elemen masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan tuntutan mereka termasuk kelompok ekstrimis Islam. Wacana radikal yang sekian lama terkubur, muncul kembali ke permukaan. Gagasan tentang negara Islam Indonesia, ideologi Islam, kekhalifahan Islam, dan pemberlakuan syariat Islam, yang selama ini tidak terdengar, kembali muncul meramaikan arena wacana pemikiran Islam di Indonesia pasca lengsernya Soeharto.

Beberapa kelompok di atas berusaha melakukan perubahan pola pikir masyarakat Indonesia mengenai prinsip-prinsip bernegara yang selama ini dianggapnya tidak sejalan dengan syari'at Islam atau al-Qur'an dan hadis. Sejak era reformasi, pengusung aliran ekstrim ini aktif memperluas pengaruhnya hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Ekspansi yang mengusung jargon "Khilafah Yes, Democracy No" terus merangsek ke tengah-tengah masyarakat melalui berbagai macam bidang kehidupan. Ideologi seperti ini muncul salah satunya diusung oleh Hizbut Thrir Indonesia, mengenai negara dan sistem pemerintahan, HTI menganggap Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal yang bersifat sekuler dengan yang sacral. Hal ini dibuktikan dari kepemimpinan nabi Muhamad yang juga sebagai seorang kepala negara.

Demikian pula, *Khulafa Al-Rasyidin* adalah pengganti nabi dalam hal agama dan pemerintahan. Kondisi ini menurut HTI berlangsung sampai berakhirnya dinasti Turki Usmani pada 1924.

Argument rasional mengenai perlunya pembentukan *Daulah Islamiyah* terletak pada kebutuhan untuk menegakkan syariat Islam. Argument seperti ini tentu saja bukan sesuatu yang baru dalam pemikiran politik Islam. Sebelumnya Ibn Taimiyah juga telah menyatakan bahwa nilai-nilai dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan dapat dibangun tanpa adanya tata sosial yang terorganisir (yakni negara). Namun dalam hal ini Ibn Taimiyah tidak menganggap kekhalifahan sebagai bentuk pemerintah yang harus diikuti.² Menurutnya, supermasi syariat harus terlihat dalam kehidupan umum dan dijamin secara hukum.³ Berpijak dari inti doktrin politik itu, Ibn Taimiyah memandang perlunya pembentukan sistem penganturan politik untuk merealisasikan cita-cita syariat.⁴

Demikian pula di era politik milenial ini, banyak para kelompok-kelompok ekstrimis mempolitisasi agama untuk kekuasaan, contoh fenomena yang terjadi saat pilkada DKI 2017 yang lalu, banyak kelompok-kelompok memakai simbol-simbol agama untuk menarik suara masyarakat. Menjadikan rumah ibadah sebagai *battleground* pertarungan politik, bahkan sampai-sampai memasang poster atau spanduk untuk larangan menyalatkan jenazah yang memilih atau mendukung Ahok (Basuki Thahaja Purnama).

Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan nash-nash agama yaitu hadis nabi untuk melarang memilih calon nomer urut genap (yakni : 2) yaitu calon yang tidak mereka dukung yang dimana calon nomer urut dua ini adalah pasangan Ahok-Djarot dan mewajibkan memilih calon nomer urut yang ganjil yaitu satu dan tiga, yang kebetulan calon nomer urut satu dan tiga ini adalah calon-calon yang didukung oleh kelompok-kelompok tersebut. Hadis yang mereka pakai adalah *إن الله وتر*

² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 43–44.

³ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), 162.

⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam Dan Masala Keagamaan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 33.

يحب الوتر . sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Sudah barang tentu bahwa hadis tersebut tidak sedikitpun menyangkut tentang politik.

Pemahaman literal dan harfiah inilah yang mengemuka dalam pemikiran kelompok-kelompok ekstrimis Islam dalam berpolitik. Sebagai salah satu implikasi dari keyakinan atas doktrin-doktrin diatas adalah bahwa kelompok ekstrimis Islam merespon pencalonan ahok yang notabennya ia seorang non-muslim sebagai calon gubernur Jakarta sebagai jihad umat islam untuk tidak memilih dan mengalahkan calon pemimpin non-muslim.

Hal ini akan mengakibatkan polarisasi masyarakat, tentu polarisasi masyarakat yang diakibatkan oleh politisasi agama akan mengancam keutuhan bangsa. Belakangan ini, muslim Indonesia yang digambarkan oleh orang luar sebagai *smiling faces* dan dianggap sebagai *distingtif* bagi negeri ini mulai tergerus dengan semakin menguatnya eksklusivitas agama. Tidak mengherankan bila sejumlah peneliti menyebut Islam Indonesia sedang mengalami *conservative turn*,". peran *civil society* mulai mengendur dalam membendung politisasi agama, terutama dua organisasi terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Padahal, yang membedakan Indonesia dengan negara mayoritas muslim lain adalah negeri ini memiliki gerakan *civil society* kuat yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah.

Dari paparan diatas, tulisan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis dinamika isu SARA dan politik yang berkembang, khususnya penggunaan simbol-simbol agama (hadis) untuk kepentingan politik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada era milenial. Penting kiranya wacana ini diangkat kepermukaan dikarenakan fenomena ekstrimisme atas nama agama, yang tampil menguat 2 dekade terakhir, selain mengejutkan banyak pihak, dampak yang ditimbulkan juga tak terkira. Bukan hanya karena alasan stabilitas politik dan keamanan namun juga karena afeknya yang ekspansif. Menguatnya sikap ekstrimis dapat memprovokasi konflik horizontal. Namun lebih dari itu, gejala politik-keagamaan ini bukan tidak mungkin mengrongrong nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan pancasila sebagai ideologi negara.

B. DISKURSUS KONSEP POLITIK ISLAM

Diskusi mengenai apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem kenegaraan atau tidak, nampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan dalam khazanah ilmu keislaman. Para sarjana muslim dalam dekade terakhir ini termasuk para sarjana muslim Indonesia gencar mendiskusikannya. Berbagai pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori akan kedudukan negara dalam agama Islam.

Setidaknya ada tiga paradigma yang mewarnai klasifikasi visi dalam pemikiran kesarjanaan muslim masa kontemporer mengenai konsepsi negara dalam Islam.⁵ Pertama, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Kelompok ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan barat. Tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih jelas lagi sistem ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad dan empat *Khulafa Al-Rasyidin* dimasa awal perkembangan Islam.

Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekeritian baik. Islam, menurut kelompok ini tidak pernah membahas atau bahkan memberikan konsep untuk bagaimana mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Ketiga, kelompok ini tidak sepakat dan tidak sependapat bahwa Islam merupakan agama serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula secara praktisnya. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bisa Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut kelompok ini Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, menurut

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 1–2.

kelompok ini, walaupun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun dalam Islam terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.

Apapun diskursus yang terjadi didalam keserjanaan muslim tentang konsep negara dalam Islam, apakah dalam Islam diajarkan atau diwajibkan untuk mendirikan negara atau tidak, faktanya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem kenegaraan untuk hidup bersama.

C. Polemik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia

Sejarah Indonesia modern dimulai dengan perbincangan di seputar *Nation-State* yang kemudian dapat melahirkan bentuk nasionalisme modern Indonesia sejak tahun 1900-an, terutama dilakukan oleh para intelektual. Hampir semua negeri muslim di dunia ketiga termasuk Indonesia mengalami problem *Nation-State* dalam mencari identitas dan karakter kebangsaannya (*Nation Character Buildings*). Problem *Nation-State* semacam ini khususnya di dunia islam akan selalu melahirkan polemik atau pertentangan antara Islam dan negara serta sebutan yang dikotomis, negara agama (*diniyyah*) dan negara sekuler (*la diniyyah*).

Sejak awal, pemikirn politik Indonesia modern dalam merespon wacaana *Natioan-State* juga ditandai dengan munculnya bermacam corak pemikiran para intelektual yang diaktualisasikan dengan pembentukan organisasi atau partai. Setidaknya ada empat corak pemikiran yang direpresentasikan oleh masing-masing pendukungnya, yaitu; pertama, tradisionalisme jawa seperti Budi Utomo (berdiri 20 Mei 1908) dan Taman Siswa. Kedua, nasionalisme sekuler seperti Nationale Indische Partij (1913), Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927), Partindo (April 1931), Parindra (26 Desember 1935), dan Gerindo (24 Mei 1937). Ketiga, Sosialisme-Komunisme seperti ISDV (Indische Social Democratische Vereeniging) yang kemudian berubah nama menjadi PKAI (23 MEI 1920). Keempat, Islam seperti SDI (1911) yang berubah menjadi SI (1912), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Perti (1930), dan Partai Islam Indonesia (1938). Kemudian pada masa pasca kemerdekaan, seperti tertera dalam kontituante (1956-1959), empat corak pemikiran tersebut tersaring menjadi tiga

ideologi besar, yaitu pertama, ideologi pencasila yang diperjuangkan oleh partai-partai seperti PNI dan PKI. Kedua, ideologi Islam yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam seperti Masyumi dan partai NU, dan ketiga, ideologi Sosial-Ekonomi sebagaimana diperjuangkan oleh partai Murba dan Partai Buruh. Kontroversi Islam versus negara ini praktis dimulai sejak masa menjelang kemerdekaan dan kemudian berlanjut pada masa orde lama, orde baru dan sampai saat sekarang ini.⁶

Polemik seperti ini mengakibatkan penolakan terhadap sistem demokrasi oleh beberapa kelompok ekstrimis Islam di Indonesia, Pertama, FPI (Front Pembela Islam), ormas ini merupakan sebuah gerakan Islam yang muncul setelah runtuhnya Orde Baru dan pada mulanya berpusat di wilayah DKI Jakarta. Fahaman keislaman yang difahami oleh FPI adalah Islam Sunni seperti juga yang dianut oleh mayoritas umat Islam dibelahan dunia dan terutama umat Islam Indonesia. FPI bertujuan untuk menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dan membela kaum teraniaya. Kerja *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam jangka panjang buat FPI adalah bagaimana membangunkan serta memberdayakan kaum muslimin yang kurang mendapatkan kesempatan untuk mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik.⁷

Perihal politik, penilaian Rizieq Shihab selaku ketua umum FPI, tentang demokrasi dapat digolongkan sebagai bersifat penolakan yang lunak. Menurutnya banyak hal dalam praktek demokrasi saat ini, terutama dalam aspek proseduralnya, sebenarnya telah dipraktekkan dalam kehidupan politik masa khalifah. Ia mencontohkan sistem pemilihan presiden secara langsung, jauh sebelum metode ini digunakan oleh negara-negara barat, umat Islam telah mempraktekannya ketika memilih Abu Bakar, menjadi khalifah untuk mengganti nabi Muhammad. Abu Bakar dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk menjadi penguasa tertinggi umat Islam.

Namun lebih lanjut, Rizieq menolak atas praktek demokrasi modern yang saat ini berkembang di Indonesia. Ia

⁶ Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 18–19.

⁷ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 436.

mengungkapkan bahwa demokarsi modern dengan sistem *One Man One Vote*, menurutnya, harus ditolak. Sebab, sama artinya dengan memberikan bobot yang sama antara satu suara sorang ulama degan satu suara seorang pelacur. Jelas, bahwa mekanisme yang demikian tidak bisa diterima. Lebih lanjut Rizieq mengatakan dalam Islam, orang yang berilmu pengetahuan atau seorang ulama, memiliki kedudukan khusus yang tidak bisa disamakan dengan masyarakat awam.⁸

Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ormas ini pertama kali dikenal masyarakat pada bulan Agustus 2000. Momen kongres MMI I yang berlangsung di kota Yogyakarta pada 5-7 Agustus 2000 merupakan momentum terpenting bagi kelahiran MMI. Isu yang dibawa oleh kelompok ini adalah tegaknya syariat Islam dan gagasan tentang khilafah Nusantara.⁹ Kelompok ini memandang demokrasi cenderung bersifat negatif. Demokrasi dilihat sebagai sebuah sistem nilai yang bersifat *vis a vis* sistem Islam. Beberapa pemikiran yang menghujat demokrasi bisa dilihat dari tulisan-tulisan Abu Bakar Ba'asyir tentang demokrasi. Menurut Ba'asyir kelemahan dan keburukan demokrasi setidaknya bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu praktek dan filosofis. Secara praktek demokrasi tidak bisa memberikan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia, tetapi justru mendatangkan berbagai bencana, seperti yang diungkapkan oleh Ba'asyir:

"Demokrasi sekuler yang dianggap sebagai model sistem pemerintahan yang plaing baik di dunia, dan ingin ditegakkan di Indonesia, ternyata tidak mampu memberikan ketenangan, rasa keadilan dan rasa amanah kepada manusia dari segala bantuk teror dan ancaman hidup, baikpribadi maupun masyarakat. Atas nama demokrasi, bahkan keruntuhan moral dibiarkan merajalela sehingga melahirkan berbagai kebrobrokan sosial dan menyebabkan penyakit kejiwaan. Munculnya berbagai ketegangan akibat manipulasi politik maupun perselingkuha moal di kalaan para elite penguasa dalam mengelola negra dan menalankan roda kekuasaannya, seperti itu karena demokrasi sekuler memang tidak mengenal kontrol yang didasrkan pada ajaran agama."¹⁰

⁸ M Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran Dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2007), 264–266.

⁹ Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, 410.

¹⁰ Irfan S Awwas, *Dakwah Dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), 130.

Olehnya dalam MMI menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan produk faham kafir. Lebih jauh lagi dalam hasil kongres Majelis Mujahidin di Yogyakarta merekomendasikan untuk menolak gagasan negara sekuler sebagai dasar negara yang hendak mengatur tata kehidupan rakyatnya yang beragama Islam. Dan menolak doktrin demokrasi, republik, sistem serta bentuk pemerintah produk paham kafir, menyerukan untuk menghidupkan sistem pemerintahan syura dan bentuk negara khilafah.¹¹

Ketika demokrasi hanya mengakibatkan kebrobrokan moral maka solusinya adalah syariat Islam. Penegakan syariat Islam adalah satu-satunya solusi yang membersihkan manusia dari pengaruh jahat dan hawa nafsunya, dan memberikan petunjuk bagi tujuan hidup, dengan menjadikan tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan fitrah yang digariskan oleh Allah.

Ketiga, penolakan yang datang dari tokoh Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Wal Jamaah, ormas ini merupakan jamaah yang bermula dari kelompok kajian yang biasa disebut dengan *salafy* atau *salafiyah* yang bermarkas di Yogyakarta dan terdapat cabang-cabang di beberapa daerah. Jamaah ini dipimpin oleh Ja'far Umar Tholib. Kelompok ini menekankan kepada jenis Islam klasik yakni Islam pada periode nabi Muhammad beserta para sahabat dan tabi'in (orang alim yang hidup setelah kewafatan nabi), keislaman seperti ini menunjukkan betapa *salafy* menjadi halaqah yang sangat tertutup terhadap perubahan peradaban manusia, bahkan kelompok ini merasa keislaman dirinya paling benar ketimbang keislaman diluar kelompoknya.¹²

Dalam dunia politik banyak tulisan yang tersebar dalam bulletin dan majalah resmi kelompok salafi ini yang secara langsung mengulas demokrasi yang dianggap berlawanan dengan prinsip politik Islam. Ia mengatakan perbedaan mendasar antara Islam dengan demokrasi adalah terletak pada asal-usul dan sumber otoritas kekuasaan itu sendiri. Dalam pandangannya, Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dasar pemahaman politik Islam ialah bahwa keimanan segala

¹¹ *Risalah Kongres Mujahidin I Untuk Penegakkan Syariat Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), 158.

¹² Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, 421–423.

kekuasaan itu milik Allah semata dan semua makhluk mau tidak mau harus tunduk kepada kekuasaan Allah yang bersifat mutlak.

Lebih jauh Ja'far dalam membentuk tatanan kenegaraan ia menjelaskan bahwa kekuasaan milik Allah, bukan milik rakyat, hukum yang sah berlaku adalah hukum Allah, olehnya keadilan hanya milik hukum Allah. Rakyat wajib dan tunduk serta tidak boleh memberontak pemerintah muslim, namun rakyat boleh memberontak kepada pemerintahan yang dipimpin oleh orang kafir. Dan kepala negara tidak dipilih oleh rakyat namun oleh *Ahlul Hali Wal Aqdi* (para ulama dan para ahli sosial ekonomi).¹³

Keempat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), HTI dalam kancah pergerakan Islam terkenal sangat radikal, mereka menandakan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan politik. Bagi HTI hanya ada dua bentuk negara atau pemerintahan: *Darul Islam* (negara atau pemerintahan Islam) atau *Darul Kufur* (negara atau pemerintahan kafir). Selama syariat belum ditegakkan dan khalifah belum diangkat, maka yang ada hanyalah *Darul Kufur*. Konsepsi politik HTI dalam hal kekuasaan politik hanya bersifat "binner" yaitu hitam putih. Gagasan HTI beranjak dari keyakinan mereka bahwa sistem Islam telah sempurna. Islam merupakan produk ilahiah, jelas lebih sempurna dibandingkan dengan apa pun produk akal manusia. Olehnya, dalam melihat demokrasi pun, perspektif yang selalu ditonjolkan para aktifis HTI ialah mengkonfrontasikan antara akal tuhan versus akal manusia.

Pemikiran-pemikiran HTI atas demokrasi dan perbandingannya dengan konsep Islam, dirumuskan secara gambalng oleh Abdul Qadim Zallum. Ada beberapa penjelasan dari Zallum terkait dengan pertentangan demokrasi dengan sistem Islam, yaitu, 1) demokrasi adalah bagian dari produk akal manusia bukan berasal dari Allah SWT. Demokrasi tidak sama sekali disandarkan pada wahyu Allah. Dalam islam yang berwenang mengeluarkan atau menetapkan berbagai hukum adalah Allah atau syariat islam, bukan akal manusia. 2) akidah yang melahirkan demokrasi adalah akidah sekulerisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan bernegara. Demokrasi memang tidak mengingkari eksistensi agama, tetpi menghapus

¹³ Ja'far Umar Thalib, "Menyoal Demokrasi", *Dalam Majalah Salafi*, edisi XXX/., 1999, 7.

peran agama dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertentangan dengan Islam. Islam dibangun di atas landasan akidah Islam, yang implikasinya adalah kewajiban untuk menjalankan perintah dan larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan bernegara. 3) ide pokok yang menjadi landasan demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Dari ide pokok ini maka rakyat berhak untuk membuat dan menetapkan hukum, konstitusi, peraturan, ataupun undang-undang apa pun. Ide pokok ini bertentangan dengan ide pokok dalam sistem Islam. Alasannya adalah Islam kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, tetapi berada di tangan syariat. Umat tidak berhak membuat hukum, yang berhak hanya Allah. 4) demokrasi merupakan pemerintahan mayoritas dan hukum mayoritas. Artinya dalam pemilihan pemimpin negara termasuk dalam pembuatan hukum berlandaskan kepada suara mayoritas. Suara mayoritas dianggap sebagai ekspresi kehendak rakyat, dan minoritas harus tunduk kepada keputusan mayoritas. Sedangkan dalam Islam suara mayoritas dan minoritas tidak bisa dijadikan sebagai penentuan hukum, tetapi memakai nash-nash syariat. Pihak yang mewakili kewenangan untuk mengadopsi dan melakukan proses legislasi hukum-hukum adalah khalifah saja. Khalifah mengambil hukum-hukum dari nash syariat melalui jihad. Dan 5) demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan: kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan berperilaku. Dalam Islam keempat macam kebebasan ini sama sekali tidak ada. Setiap muslim wajib mengikatkan diri kepada hukum syariat dalam keseluruhan kehidupannya. Tidak ada kebebasan bertingkah laku dalam Islam, setiap muslim terikat kepada perintah dan larangan Allah.¹⁴

D. PEMBAJAKAN HADIS NABI DALAM POLITIK MILENIAL

Pembajakan hadis yang dimaksud disini adalah politisasi agama yang mana diartikan sebagai suatu diskursus mengenai pertukaran kepentingan. Dimana agama dan simbol-simbol yang melekat didalamnya dapat dijadikan suatu komoditas yang dapat dipertukarkan atau dimanfaatkan guna memperoleh keuntungan-keuntungan bagi pelakunya, dalam

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Kufur* (Bogor: PTI, 2001), 10–80.

hal ini keuntungan dalam berpolitik, semisal merauk suara banyak untuk memenangkan sebuah partai atau calon pemimpin politik yang diusungnya.

Meminjam istilah Karl Marx bahwa agama adalah candu yang bisa membius para pemeluk agamanya bahkan lebih jauh lagi bisa menjadi alat justifikasi dalam dunia ekonomi seperti justifikasi pemilik modal dan power dalam mengeksploitasi kelas kerja. Maka agama tersimpan potensi yang luar biasa untuk mempersuasi masyarakat. Dengan kekuatannya inilah kemudian para pemilik kekuasaan atau dalam konteks politik, para politikus mencoba memanfaatkan agama sedemikian rupa untuk mengendalikan kelompok masyarakat yang menjadi target dan sasaran politiknya.

Menurut Goldziher hal semacam ini susah bahkan mustahil dihindari, menurutnya didalam suatu masyarakat yang berlandaskan agama, pertimbangan-pertimbang keagamaan pasti akan memasuki wilayah-wilayah politik dan masalah-masalah politik akan mengambil bentuk isu-isu keagamaan.¹⁵

Tentu penguatan isu-isu primodialisme seperti isu agama dalam kehidupan berpolitik, merupakan bentuk kemunduran sistem politik di era demokrasi partisipatoris seperti di negara Indonesia ini. Gaya politik tersebut lebih pada sistem politik yang menafsirkan bahwa proses politik adalah untuk memperoleh kekuasaan. Paradigma itu telah menghilangkan aspek edukasi dalam berpolitik bagi pemilih (voter). Dalam bukunya *Psychopathology And Politics* Lasswell mengatakan bahwa, orientasi politik lebih banyak diartikan “siapa mendapat apa”, kapan dan bagaimana (*who gets what, when and how*).¹⁶ Pola politik Lasswell ini sangat tepat untuk menggambarkan dinamika politik yang berkembang di Indonesia ini para era milenial.

Salah satu contoh fenomena yang terjadi dalam politisasi agama adalah penggunaan atau tindakan memanipulasi sejumlah ayat al-Qur’an, khususnya yang populer adalah surah al-Maidah ayat 51 yang sejumlah kalangan muslim dianggap

¹⁵ Ignaz Goldziher, *Introduction Islamic Theology And Law* (Princeton: Princeton University Press, 1981), 168.

¹⁶ Harold D Lasswell, *Psychopathology And Politics* (Chicago: University Of Chicago Press, 1930), 65.

sebagai larangan dari tuhan untuk memilih pemimpin non muslim.

Selain itu Maraknya sejumlah kelompok yang saling menghujat dan memaki lawan, memanfaatkan sarana peribadatan untuk kampanye dan mendiskritkan lawan, serta memanipulasi simbol, wacana, tradisi, ajaran, sejarah, dan teks-teks keagamaan untuk kepentingan politik praktis-pragmatis dan mendukung paslon tertentu. Bagi mereka apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk jihad politik dengan berlandaskan ayat-ayat perang. Mereka berorasi di depan public dengan memakai surah Ali Imran, al-Anfal, dan at-Taubah untuk kontestasi politik. Bagi mereka pilkada atau pilpres adalah sebuah peperangan seperti yang pernah dilakukan oleh rasulullah dan para sahabatnya ketika perang melawan orang-orang kafir.

Misalnya, polemik Pilkada di DKI Jakarta, sangat jelas kelompok-kelompok ekstrimis menggunakan masjid-masjid di Jakarta, terutama pada waktu khotbah jum'at, sebagai medium untuk kampanye dan propaganda memenangkan pasangan calon tertentu serta alat untuk merendahkan dan menjelek-jelekan paslon lain. Larangan mengurus, mendoakan, dan menyolati jenazah yang sewaktu masih hidup mendukung paslon tertentu juga bagian dari terot teologis kepada paslon tertentu untuk memenangkan paslon lain. Demikian pula seruan ancaman masuk neraka bagi yang mendukung dan memilih paslon tertentu atau harapan masuk surga bagi yang mendukung dan memilih paslon tertentu juga merupakan bagian dari pembajakan agama yang dilakukan sejumlah kelompok guna meraih kemenangan dalam pilkada.¹⁷

Isu SARA khususnya politisasi agama menjadi pilihan untuk menjatuhkan lawan politik sebagai langkah strategis meningkatkan elektabilitas kandidat di mata pemilih, yang mana konspirasi politik agama yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta ini berhasil dan berujung pada kekalahan pasangan Ahok-Djarot. Dimana pasangan Ahok-Djarot gencar mendapatkan serangan SARA dari tim sukses dan simpatisan lawan politiknya.

Kelompok-kelompok ekstrimis ini tidak hanya memakai masjid untuk kampanye atau propaganda, namun juga

¹⁷ Sumanto Al-Qurtubi, *Manipulasi Agama Dalam Pilkada Jakarta*, n.d., <https://www.dw.com/id/manipulasi-agama-dalam-pilkada-jakarta/a-38379477>.

memanfaatkan media sosial, mereka sadar bahwa media sosial para era milenial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi masyarakat umum khususnya anak-anak muda muslim milenial dalam belajar agama. Tokoh agama yang *Digital Friendly* lebih mudah untuk diterima karena masyarakat khususnya anak-anak muda muda untuk mengakses secara mudah kapan pun dan dimana pun mereka menginginkannya.

Media sosial semisal you tube, whatsapp, facebook, atau line, situs-situs web, dan lain-lain mereka gunakan menjadi sarana untuk mempropaganda, dengan kekuatan jaringan internet (baca: media sosial), para pengguna dapat menyebarkan pemahaman tentang politik-keagamaan serta menyebarkan kepercayaan dan identitas perlawanan mereka kepada para pengguna media sosial lainnya.

Contoh-contoh hadis lain yang dibajak demi kepentingan politik salah satunya adalah *إن الله وتر يحب الوتر* “sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil”, dalam konteks pilkada DKI hadis ini digunakan untuk melarang memilih calon nomer urut genap (yakni : 2) yaitu calon yang tidak mereka dukung yang dimana calon nomer urut dua ini adalah pasangan Ahok-Djarot dan mewajibkan memilih calon nomer urut yang ganjil yaitu satu dan tiga, yang kebetulan calon nomer urut satu dan tiga ini adalah calon-calon yang didukung oleh kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok ekstrimis ini mempunyai keyakinan bahwa cara berpolitik seperti ini adalah mengikuti nabi, namun walaupun nabi betul berpolitik juga, politik masa nabi dan sekarang hampir, atau bahkan pasti tidak ada sama-samanya. Sekarang banyak partai-partai yang hanya mengurus kelompoknya, koalisi hanya demi jatah, kampanye penuh dengan kebohongan serta merendahkan dan menjelek-jelekan kelompok lawannya. Olehnya pada dasarnya banyak partai Islam bermunculan dan tokoh-tokoh Islam getol berkampanye dengan menggunakan simbol-simbol agama lebih didorong oleh keinginan atau nafsu untuk mendapatkan kekuasaan daripada didorong oleh alasan-alasan yang murni keagamaan.

E. PEMISAHAN AGAMA DAN NEGARA: SEBUAH SOLUSI

Merebaknya penggunaan isu-isu agama dalam perpolitikan di Indonesia oleh sebagian kelompok Islam harus mendapatkan perhatian yang serius. Karena hal ini bisa

membuat konflik berkepanjangan, kestabilan keamanan negara atau masyarakat terancam, masyarakat akan menjadi terkotak-kotak, saling curiga serta perpecahan anak bangsa.

Beberapa pengamat menyebutkan dua hal sebagai pertanda menguatnya arus radikalisme dan ekstrimesme dalam politik-keagamaan. Pertama, terus menguatnya gerakan dan ideologi keagamaan yang mendesak agenda perubahan sistem sosial-politik secara menyeluruh. Kedua, menonjolnya perilaku dan sikap pro kekerasan dalam merespon konflik dan perselisihan politik.¹⁸ Ekstrimisme yang dipolitisasi dapat menyeruak menjadi semacam gerakan atau desakan yang menuntut diwujudkan suatu tatanan sosial berdasarkan norma-norma kormunal, berdasarkan syariat Islam.

Olehnya perlu pemisahan agama dari negara untuk menghindari politisasi agama. Karena penyatuan politik dan agama akan berakibat pada pergeseran peran agama, semakin agama digunakan sebagai alat politik, semakin ia kehilangan peran profetiknya. Yakni, peran untuk mengoreksi ketimpangan dan ketidakadilan. Pemisahan agama dengan politik menjadi sebuah gagasan untuk menghilangkan virus politisasi agama, karena upaya politisasi agama yang menggunakan simbol agama dan pesjuangan politik akan mencemarkan kesucian Islam, dan Islam hanya sekedar dijadikan alat untuk meraih kedudukan politik, sementara praktik politik mereka jauh dari spirit Islam.

Soekarno menjelaskan campur tangan agama dan politik ataupun politik terhadap urusan agama, tidak saja akan merusak kehidupan kaum muslimin, tetapi juga negara atau pemerintahan yang bersangkutan. Dengan lepasnya politik terhadap Agama juga agar umat Islam tidak terpaku pada bentuk-bentuk formal atau luar ajaran Islam, tetapi memperhatikan isi (substansi) atau semangat ajaran Islam. Keterbelakangan kaum muslim selama berabad-abad karena mereka lebih memperhatikan bentuk formal dari luar agama. Dengan beralihnya perhatian pribadi-pribadi muslim dari bentuk formal dan luar ke bentuk-bentuk dalam (isi) Islam, maka akan timbul inisiatif dari dalam diri sendiri untuk

¹⁸ ed Bamualim, Chaider S, Hilman Latief, Irfan Abu Bakar, *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme* (Jakarta: CSRC, 2018), 1.

berusaha menginternalisasi dan mensosialisasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan pribadi. Sosialisasi nilai-nilai Islam dalam negara, tanpa paksaan dari luar, secara lambat laun akan membentuk budaya masyarakat Islam.¹⁹

Menurut Abdurrahman wahid Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam kasus bentuk negara, menurutnya Islam tidak mempunyai aturan baku. Hal yang terpenting adalah terpenuhinya tiga prinsip, yaitu mengedepankan permusyawaratan, ditegaknya keadilan, dan adanya jaminan kebebasan.²⁰ Sejalan dengan itu, Ahmad Syafi'i Maarif menjelaskan bahwa al-Qur'an tidak mengemukakan model spesifik mengenai struktur organisasi politik yang harus diimplementasikan oleh umat Islam. Perhatian utama al-Qur'an adalah untuk menciptakan masyarakat dan negara berdasarkan keadilan dan moralitas. Karena itu model dan struktur organisasi politik Islam masih mungkin diperdebatkan, diperbaiki dan disesuaikan menurut kebutuhan dan tuntunan serta kondisi umat Islam, sejauh berbagai prinsip dasarnya dipertahankan.²¹ Olehnya Islam tidak menentukan model pemerintahan atau konsep pemerintah, Islam hanya menentukan bahwa dasar pemerintahan adalah permusyawaratan, keadilan dan menjamin kebebasan masyarakat.

Beranjak dari itu semua, Dalam konteks ke-Indonesia-an yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari'ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Menjadikan Islam sebagai ideologi negara yang bersifat plural akan memicu disintegrasi yang berbasis pada sektarianisme. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, dan kebebasan, yang semua itu tercermin dalam Pancasila.²²

Islam dimaknai sebagai nilai pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad, yaitu ketika beliau membuat undang-undang

¹⁹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarna Vs Natsir* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 77.

²⁰ Ma'mum al-Brebesy Murod, *Menyikap Pemikiran Politik Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 155.

²¹ Ahmad Syafii Ma'arif, "Islam Di Masa Demokrasi Liberal, Dalam Prisma," vol. Vol. 5 (1988), 25.

²² Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 129.

suatu Negara di Madinah, yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah. Rasul didalam piagam Madinah tidak mencantumkan Islam atau syari'at Islam, dalam piagam Madinah rasul hanya mencantumkan prinsip-prinsip berkehidupan, yaitu prinsip umat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antar lintas agama, tolong menolong dan membela yang teraniaya, hidup bertetangga, perdamaian, pertahanan, musyawarah, keadilan dan pelaksanaan hukum.²³

Oleh karenanya, Apa yang dilakukan nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa Negara Islam formal tidak pernah digunakan, serta yang paling penting adalah pelaksanaan nilai-nilai keislaman bukan simbol atau atribut. Maka suatu keniscayaan bahwa Islam ditampilkan sebagai nilai, artinya menerapkan nilai-nilai keislaman dalam konstruk keindonesiaan dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat atau sosial politik yang adil, egaliter, dan demokrasi tanpa membawa simbol-simbolnya. Karena hal ini akan lebih bisa efektif untuk menerapkan Islam yang sesungguhnya atau Islam kaffah.

F. KESIMPULAN

Masih banyak kelompok-kelompok umat Islam yang belum bisa menempatkan agama dan politik dengan benar, sehingga politisasi agama dijadikan sebuah terobosan unggulan dalam memenangkan kontestasi politik. Pembajakan simbol-simbol agama seperti hadis-hadis nabi demi kepentingan politik kekuasaan menjadi salah satu instrument propaganda untuk mendulang suara. Tentu dimengerti secara umum bahwa ketidakadilan, pengentasan kemiskinan, dan bagaimana menjadikan bangsa ini maju berdaulat dan bisa terdepan dengan negara maju tidak dapat dihasilkan oleh pemimpin yang dihasilkan dari politisasi atas perbedaan-perbedaan identitas termasuk politisasi atas agama. Bahkan fenomena politik-keagamaan ini menjadikan energi masyarakat anak bangsa habis untuk hal-hal saling memusuhi, saling melakukan persekusi, saling mengucilkan satu sama lain.

Umat beragama (khususnya umat Islam) harus memosisikan negara dan agama dalam posisinya yang tepat,

²³ Alamsyah, *Otentitas Piagam Madinah Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern* (Bandung: Humanity Publishing, 2009), 74.

serta menghilangkan prasangka-prasangka buruk atas kelompok agama tertentu, sehingga terjadi saling belajar, saling memahami, dan saling bekerja sama, dengan cara memposisikan agama dan negara secara tepat, mendiskusikan secara kritis peran-peran yang akan diambil oleh agamawan dan negarawan tentang negara dan agama. Hal ini akan menimbulkan pemanfaatan nilai-nilai pokok agama (prinsip-prinsip agama) untuk kepentingan negara, seperti, keadilan, musyawarah, kejujuran, kebersamaan, solidaritas sosial, kerja sama, dan mengutamakan dialog, bukan kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Sumanto. *Manipulasi Agama Dalam Pilkada Jakarta*, n.d. <https://www.dw.com/id/manipulasi-agama-dalam-pilkada-jakarta/a-38379477>.
- Alamsyah. *Otentitas Piagam Madinah Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern*. Bandung: Humanity Publishing, 2009.
- Awwas, Irfan S. *Dakwah Dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- Bamualim, Chaider S, Hilman Latief, Irfan Abu Bakar, ed. *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, Dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: CSRC, 2018.
- Goldziher, Ignaz. *Introduction Islamic Theology And Law*. Princeton: Princeton University Press, 1981.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lasswell, Harold D. *Psychopathology And Politics*. Chicago: University Of Chicago Press, 1930.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante, Islam Dan Masala Keagamaan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. "Islam Di Masa Demkrasi Liberal, Dalam Prisma." vol.Vol. 5 (1988).
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mubarak, M Zaki. *Genealogi Islam Radikal Di Indonesia: Gerakan, Pemikiran Dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Murod, Ma'mum al-Brebesy. *Menyikap Pemikiran Politik Gus Dur Dan Amin Rais Tentan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarna Vs Natsir*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969.
- Thalib, Ja'far Umar. "Menyoal Demokrasi", *Dalam Majalah Salafi*. Edisi XXX/., 1999.
- Yani Anshori, Ahmad. *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog*

Kebangsaan Di Indonesia. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Zallum, Abdul Qadim. *Demokrasi Kufur*. Bogor: PTI, 2001.

Risalah Kongres Mujahidin I Untuk Penegakkan Syariat Islam. Yogyakarta: Wihdah Press, 2000.